

The Role of Organizations in Taking Care Life Harmonization Between Religious Communities

Menjaga Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama Melalui Peran Organisasi

Ulul Huda^{1*}, Tenang Haryanto²

¹² Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Article Information:

Received : May 29,
2023
Revised : July 29, 2023
Accepted : August 16, 2023

Keywords:

Organization, Religious People,
Harmonization

***Correspondence Address:**

Ulul.huda@unsoed.ac.id

Abstract: Research has been conducted on community interactions that can produce tolerance to create harmony in diversity in Banyumas Regency. The specific objectives of this study are to find patterns of interaction that occur in the heterogeneous Banyumas community, to find objective is to explore the concept of community views on diversity, and it reveals the involvement of organizations and or communities that intersect with issues of tolerance in creating a conducive religious atmosphere in Banyumas Regency. This research is qualitative and analytic descriptive. This method is carried out to solve actual problems by collecting data, compiling or classifying, analyzing and interpreting it using multicultural education theory and then drawing conclusions. This research focuses on the embodiment of the harmony pattern of Banyumas community diversity through FKUB, SMLI and FORSA. These three organizations have a real contribution in the formation of a harmony society in diversity in Banyumas Regency. The results of this study show that the harmony of religions in Banyumas regency has been successfully carried out because there is no mutual suspicion of interfaith leaders and have the same understanding of "never being different in harmony" which forms the basis of religious and social life. In addition, the community togetherness is based on the sincerity of the characters causing religious harmony in Banyumas Regency.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji interaksi masyarakat Banyumas dalam menjaga toleransi sehingga tercipta kerukunan dalam keberagaman. Tujuan penelitian ini untuk menemukan pola interaksi yang terjadi di masyarakat Banyumas yang heterogen, mengeksplor pandangan masyarakat tentang keragaman, dan mengungkap peran organisasi masyarakat dalam menciptakan suasana keagamaan yang kondusif di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis kerukunan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bersifat kualitatif dan analitik deskriptif. Metode ini dilakukan untuk mengurai masalah aktual dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan menafsirkannya menggunakan teori

pendidikan multikultural dan kemudian membuat kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada perwujudan pola harmoni keberagaman masyarakat Banyumas melalui FKUB, SMLI dan FORSA. Ketiga organisasi ini memiliki kontribusi nyata dalam pembentukan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyumas berhasil dilakukan karena tidak ada saling curiga terhadap tokoh lintas agama dan memiliki pemahaman yang sama tentang "tidak pernah berbeda dalam kerukunan" yang menjadi dasar kehidupan beragama dan sosial. Selain itu, kebersamaan masyarakat didasari oleh ketulusan karakter yang menyebabkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyumas.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara telah memuat prinsip keberagaman yang substansial dan menegaskan diri sebagai negara yang menganut paham religius dan keberagaman yang kuat, sehingga setiap warga negara diwajibkan untuk memiliki satu keyakinan agama yang menjadi patokannya sesuai dengan keyakinan masing-masing, baik memilih sebagai penganut agama Islam, Kristen, Budha, Hindu maupun Khonghucu¹. Di sinilah letak agama sebagai hak yang paling asasi. Agama merupakan wilayah *private* dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk intervensi negara. Agama berhubungan dengan wilayah *private oriented*, sedangkan politik (negara) beroperasi pada wilayah *public oriented*.²

Dalam hal ini, perbedaan agama merupakan fakta kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, yang dituntut untuk dibangun dan dikembangkan secara harmonis. Antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain menurut konstitusi adalah sama dan sederajat, sehingga tidak bisa saling mengklaim yang paling benar (baca: truth claim), karena posisinya sama-sama sebagai warga negara yang disatukan oleh prinsip "berbeda tetapi tetap satu", sekaligus diikat oleh satu prinsip kerukunan dan keharmonisan yang dinamis. Kerukunan dan toleransi pada gilirannya menjadi pijakan dasar

¹ Wendra Yunaldi, "The Dynamic Interpretation of Pancasila in Indonesian State Administration History: Finding Its Authentic Interpretation," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15166>.

² Ihsan Sa'dudin et al., "Interaksi Sosial Komunitas Islam Aboge Dengan Masyarakat Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas," *Jurnal Tarbiyatuna* 10, no. 1 (2019): 103–13, <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i1.2308>.

pengembangan masyarakat yang beradab dan berkeadaban, karena perbedaan agama tidak lagi dijadikan sebagai sesuatu yang eksklusif, melainkan dijadikan sebagai sarana untuk saling mengenal dan saling memahami³. Dalam rangka meneguhkan jati diri sebagai bangsa yang demokratis dan berkeadaban. Toleran dan kerukunan senantiasa menjadi pijakan dasar setiap bangsa, apalagi bangsa Indonesia yang *notebene* menjadikan religiusitas sebagai salah satu bagian dari konstitusi⁴.

Menjalani hidup toleran dan rukun dalam komunitas yang berbeda paham, aliran maupun agama, secara substansial akan berdampak pada interaksi social yang harmonis dan dimanis⁵. Sebaliknya, intoleransi dan eksklusivisme akan melahirkan konflik dan anarkisme yang berkepanjangan, karena toleransi dan kerukunan hanya dipahami dengan kaca mata yang bias, sehingga menimbulkan konflik baru antar umat beragama⁶. Padahal, semua agama sudah tentu mengajarkan umatnya untuk taat pada kedamaian dan ketenteraman, yang pada gilirannya dapat memperkuat cita-cita sebagai masyarakat madani (*civil society*). Menurut⁷ bahwa *civil society* merupakan masyarakat dari berbagai macam kelompok, ras, suku, agama, ataupun apa saja. Semuanya bisa hidup dalam satu masyarakat, dengan saling memahami perbedaan.

Salah satu daerah dengan tingkat kehidupan harmonis cukup terjaga adalah Banyumas. Dengan heterogenitas pada sektor agama, menjadikan Banyumas sebagai daerah yang majemuk⁸. Melihat iklim bermasyarakat yang kondusif di tengah pluralitas ini menjadikan Banyumas sebagai daerah yang cukup representatif dalam menunjukkan harmoni keberagamaan. Kesadaran kolektif

³ Mohamad Suhaidi, "Harmoni Masyarakat Satu Desa Tiga Agama Di Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura," *Harmoni* 13, no. 2 (2014): 8–19.

⁴ Muhammad Sahal, Akhmad Arif Musadad, and Muhammad Akhyar, "Tolerance in Multicultural Education: A Theoretical Concept," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 4 (2018): 115, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.212>.

⁵ Wimmy Haliim, "Harmony and Tolerance as a Tengger Identity: Reflections for Indonesian Identity and Unity Degradation," *International Journal of Social Sciences* 1, no. 1 SE- (April 2018): 1–8, <https://doi.org/10.31295/ijss.v1n1.1>.

⁶ Eka Safitri, "Instilling the Value of Religious Pluralism as the Effort to Overcome the Religious Conflict," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.3897>.

⁷ **Shofan (2004: 53)**

⁸ Mikael Hjerm et al., "A New Approach to the Study of Tolerance: Conceptualizing and Measuring Acceptance, Respect, and Appreciation of Difference," *Social Indicators Research* 147, no. 3 (2020): 897–919, <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02176-y>.

yang terjalin adalah kunci utama terbentuknya kehidupan yang aman dan tentram. *Sense of belonging* terhadap Banyumas yang dipupuk oleh masing-masing penganut agama mampu mencegah konflik lintas agama. Hal ini berarti toleransi atau kesadaran mengenai konsep *liyan* sudah terkondisikan dengan baik.

Kabupaten Banyumas yang memiliki 6 (enam) agama yang resmi diakui pemerintah, yaitu Kristen, Katholik, Islam, Hindu, Budha dan Khonghucu⁹, masyarakatnya mulai dapat menerima dan memahami Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sebuah entitas agama, meski dalam pengertiannya, pemerintah masih menempatkannya sebagai entitas budaya¹⁰. Kondisi ini diperkuat dengan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas yang memberi ruang pada perwakilan Penghayat untuk menjadi pengurus FKUB¹¹.

Ruang ini membuka kesempatan dialog dan diskusi terbuka kepada komunitas agama lain dan masyarakat secara luas bahwa Penghayat dapat diterima dengan layak oleh kalangan masyarakat Banyumas. Dalam bermasyarakat, komunitas Penghayat tidak mengeksklusikan dirinya, mereka tergabung dalam paguyuban-paguyuban yang saling melakukan komunikasi dan memiliki intensitas pertemuan. Memang diakui bahwa keberadaannya menjadi minoritas, karena memang tidak setiap anggota paguyuban mau menunjukkan identitasnya sebagai Penghayat. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak cukup mengenal masyarakat Penghayat terutama yang ada di Kabupaten Banyumas, bahkan termasuk anak keturunannya tidak jarang mau melanjutkan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya.

Potret keberagaman masyarakat Banyumas dapat ditilik salah satunya dari kepengurusan FKUB yang beragam dan mewakili masing-masing agama termasuk Penghayat. Selain itu terdapat semacam badan otonom FKUB yaitu Generasi Muda (GM) FKUB, Solidaritas Mahasiswa Lintas Iman (SMLI) dan satuan Buletin *Bener (Beda Neng Rukun)*. Melihat struktur yang dimiliki dalam FKUB ini, menjadi salah satu referensi bahwa potret keberagaman di Banyumas

⁹ I Wayan Watra, *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia*, 2020.

¹⁰ Oki Wahyu Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69>.

¹¹ Muhammad Firdaus, "Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia," *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014): 63–84.

sangat mengakomodasi dalam keterbukaan bagi komunitas yang dianggap minoritas.

Selain hal itu, pada bulan Mei 2017, telah dideklarasikan dan diluncurkan komunitas lintas agama atau lintas iman, yang bernama Forum Persaudaraan Lintas Iman (Forsa) Banyumas. Komunitas ini memiliki visi bagaimana meneguhkan kebhinekaan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya komunitas ini diluncurkan oleh Bupati Banyumas dan dideklarasikan oleh Ketua FKUB Banyumas yang disaksikan oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Terkait dengan potret keberagamaan, semangat membina dan melakukan interaksi antar agama sudah menjadi kebutuhan untuk menghindari curiga dan meminimalisasi timbulnya konflik keberagamaan. Forsa Banyumas telah melakukan beberapa kegiatan sosial, termasuk kampanye perdamaian dan kerukunan kepada masyarakat yang ujungnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan kondisi dan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai strategi dalam perwujudan harmoni keberagamaan masyarakat di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat majemuk. Keutuhan negara adalah sebuah tanggungjawab kolektif. Sehingga siapapun yang merasa memiliki rasa nasionalisme harus menunjukkan kepeduliannya, termasuk di dalamnya menciptakan kehidupan yang harmonis. Jika sebuah masyarakat sudah pada kondisi ini, maka keutuhan NKRI tidak perlu dikhawatirkan. Sudah barangtentu akan menjadi tugas atau kewajiban bersama, meskipun masing-masing masyarakat berbeda khususnya agama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan secara mendalam kontribusi lembaga atau komunitas yang dekat dengan isu pluralisme dan toleransi di Banyumas, seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), SMLI (Solidaritas Mahasiswa Lintas Iman), Forsa, dan SMLI.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan analisis data dalam

bentuk kata-kata atau kalimat¹². Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan menganalisa harmoni keberagaman masyarakat di Banyumas. Jenis penelitian ini ialah kualitatif (*qualitative research*) dan Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*¹³. Metode ini merupakan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis dan menginterpretasikannya dengan menggunakan teori pendidikan multikultural kemudian dilanjutkan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Keberagaman atau religiusitas merupakan tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan seseorang atas ajaran agama yang diyakininya, atau suatu sikap penyerahan diri kepada suatu kekuatan yang ada di luar dirinya yang diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku individu sehari-hari.¹⁴ Para tokoh lintas agama di Banyumas memiliki perspektif masing-masing mengenai agama sebagai sumber perdamaian. Tokoh Agama Islam sekaligus sebagai Ketua FKUB Banyumas dan Rektor IAIN Purwokerto Dr. KH. Moh. Roqib., M.Ag menerangkan bahwa:

“Agama dilihat dari sudut normatif, selalu mengajarkan kehidupan yang harmoni, apapun agamanya. Menurutnya secara teologis, teks-teks kitab suci mengungkap berbagai perbedaan baik perbedaan yang bersifat sosiologis dan teologis, seluruhnya mengajak pada kerukunan. Di dalam kitab suci ditemukan bahwa Tuhan sesungguhnya cinta akan semua. Maka dapat dikatakan bahwa agama sebagai perekat heterogenitas dan pereda konflik. Hal tersebut idealnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat. Sebab, setiap pembacaan terhadap teks kitab suci agama apa pun akan berkonsekuensi pada perbedaan pemahaman dan perilaku keagamaan bagi satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan yang tidak mungkin dielakkan karena ajaran yang absolut dan transenden tersebut masuk pada wilayah pemikiran seseorang yang relatif, akhirnya ajaran tersebut menjadi relatif. Perbedaan tersebut tidak mesti konflik dan konflik tidak mesti berarti kekerasan. Perbedaan dalam pemahaman dan perilaku keagamaan merupakan sesuatu yang niscaya terjadi harus disikapi dengan bijak. Agama adalah perekat umat yang berbeda di kalangan internal maupun eksternal umat beragama.”

¹² Carmel Maher et al., “Ensuring Rigor in Qualitative Data Analysis: A Design Research Approach to Coding Combining NVivo With Traditional Material Methods,” *International Journal of Qualitative Methods* 17, no. 1 (July 2018): 1609406918786362, <https://doi.org/10.1177/1609406918786362>.

¹³ Neil Salkind, “Encyclopedia of Research Design” (Thousand Oaks, California, 2010), <https://doi.org/10.4135/9781412961288> NV - 0.

¹⁴ Irwan Abdullah dkk, *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global* (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2008).

Tokoh agama Katolik, GMS Agung Basuki., SH.,MH. menjelaskan bahwa:

“Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik sangat menekankan dan turut memperjuangkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, karena dan demi keharmonisan, persaudaraan, damai sejahtera, persatuan, dan “keselamatan” segenap umat manusia. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dilihat sebagai suatu kebutuhan hakiki dan universal.”

Pdt. Maria Puspitasari dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwokerto menjelaskan bahwa dalam iman Kristen ada yang disebut hukum kasih yang bunyinya:

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.... Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." (Matius 22:37,39).

Hukum kasih tersebut menunjukkan relasi orang Kristen dengan Tuhan yang Esa yang diyakininya. Disaat yang sama orang Kristen juga menghargai orang beragama lain meyakini Tuhan dengan pemahaman dan caranya masing-masing. Sedangkan hukum yang kedua, *Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri*, menunjukkan bahwa Gereja atau orang Kristen Indonesia menghargai kemanusiaan, yaitu bagaimana memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri. Hal ini juga mengarah pada semangat menjaga persatuan Indonesia. kemudian cara mewujudkan pergaulan yang selalu dijiwai kebersamaan dalam mengambil keputusan bersama untuk mewujudkan keadaan yang adil dan makmur. Tokoh agama Hindu sekaligus penasehat PHDI Kabupaten Banyumas Ir. I. Made Sedana Yoga., MS berpandangan bahwa:

“Hubungan manusia dengan sesama manusia / warga bangsa hendaknya mengarah kepada kerukunan, kesatuan dan persatuan baik dalam cita-cita pikiran maupun sikap dalam menghadapi masalah bangsa dan negara menuju kebahagiaan perdamaian yang kekal. Dalam ajaran Hindu, kerukunan tersebut dapat tercapai jika mengamalkan *Tri Hita Karana*, yaitu: hubungan manusia dengan Sang Pencipta dalam wujud bhakti yang murni; hubungan manusia dengan sesama warga negara dan atau sesama umat manusia dalam wujud kebersamaan / persatuan sejati; hubungan manusia dengan lingkungan secara harmoni.”

Sementara menurut Romo Tryandhi Boedianto Penasehat Vihara Buddha Dipa Purwokerto mengatakan:

“Sebagian besar umat Buddha lebih mengutamakan belajar dan praktik *dharma* dari pada ritual keagamaannya baik dalam kehidupan pribadi atau di masyarakat. Dalam Kitab Suci Agama Buddha “*Tripitaka*” (tiga keranjang) yang berisi khotbah-khotbah Sang Buddha Gautama Guru Agung junjungan kita, terdapat inti dari ajaran beliau berupa 3 kalimat yang sangat luhur, yaitu: “*sabba papasa akaram*

kusalasa upasampada sacitta pariyodapanam”, yang artinya: *hindarilah kejahatan tambahlah kebajikan sucikan hati dan pikiran*”. Inti ajaran Sang Buddha inilah yang perlu perlu dihayatai dan praktikkan dalam kehidupan keseharian, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan kemasyarakatan. Untuk menuju keluhuran batin, juga diperlukan adanya pengorbanan sifat “ke-aku-an” dari seseorang dan pengembangan toleransi yang tinggi terhadap sesama makhluk. Selain itu batin dan pikiran kita harus bersih dari *catur mara* (empat rintangan batin), yaitu: dosa (kebencian), loba (keserakahan), *moha* (ketidaktahuan), dan *irsia* (iri hati). Sehingga titik kulminasi dari pengaplikasian ajaran Sang Buddha Gautama adalah terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam hidup.”

Js. Budi Rohadi Rohaniawan Konghucu dari Klenteng Hok Tek Bio Purwokerto mengungkapkan, bahwa dalam prespektif agama Khonghucu manusia harus menerima adanya perbedaan,

“kalau kita ingin tegak dalam jalan suci Ketuhanan kita harus menyadari adanya Im dan Yang, yang merupakan simbol dari perbedaan yang harmonis dan saling melengkapi.”

Dalam ajaran Konghucu manusia diwajibkan untuk selalu membina diri. Dalam Kitab Kitab Si Shu (Da Xue Bab utama : 6) diungkapkan “*karena itu dari pemimpin sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok*”. Jelas bahwa pembinaan diri adalah proses pembelajaran menjadi manusia yang seutuhnya. Tersirat dalam lambang agama Khonghucu di Indonesia yaitu Genta bertuliskan Zhong Su. Kenapa “ *Zhong* “ (*Satya*) karena ketika mendapat satya dalam firman Tuhan yang kita imani maka dapat selaras didalam jalanNya dan “ *Su* “ (*Tepo Sariro*) adalah bagaimana kita sebagai sesama manusia dapat harmonis, dengan sesamanya, ada ayat "apa yang diri ini tiada inginkan, jangan diberikan kepada orang lain“ (Zhong Yong XII : 3). Tentunya ketika kita dapat memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan untuk diri kita sendiri maka toleransi dalam keberagaman akan terbentuk dengan sendirinya ¹⁵. Setelah diri ini dapat membina diri, maka kita tidak hanya dapat egois untuk membuat diri sendiri damai. Maka diperlukan suatu hubungan yang lebih luas dalam menciptakan kedamaian.

Maka demikianlah bahwa setiap agama membawa misi perdamaian, sebagaimana disimpulkan bahwa tokoh agama Kab. Banyumas Baik Islam,

¹⁵ Ahmad Rosidi; Anik Farida; Asnawati; Edi Junaedi;M. Taufik Hidayatullah; R. Adang Nofandi; Raudatul and Ulum;Reslawati; Wakhid Sugiyarto; Zaenal Abidin Eko Putro, *Potret Umat Agama Khonghucu Di Indonesia*, 2019.

Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan Penghayat berpandangan sama dengan memberi penjelasan dengan dasar dari ajarannya masing-masing bahwa agama mengajarkan umat manusia untuk menebar kebaikan dan mewujudkan kehidupan yang damai. Setiap umat beragama mencita-citakan bahwa perdamaian mewujud dalam kehidupan yang majemuk ini. Namun sayangnya, sebagian umat beragama menciderai misi tersebut dengan melakukan hal yang bertentangan dengan ide perdamaian yang ada dalam agamanya.

Banyumas merupakan peralihan antara Sunda dan Yogyakarta, maka Banyumas oleh beberapa pakar dikatakan sebagai subkultur Jawa yang menyimpan nilai-nilai luhur, lengkap dengan berbagai macam filosofinya. Variasi nilai luhur tersebut tersebar dalam rutinitas, dan ia pun membentuk entitas budaya Jawa yang unik¹⁶. Maka karakteristik orang Banyumas dengan berbagai nilai luhur dan tradisi yang dijalankan telah menyatu dalam dirinya dan tata laku terhadap lingkungannya. Sehingga membentuk harmonisasi budaya atas kesadaran-kesadaran untuk menjaga kerukunan dan kehidupan yang damai, dimana kerukunan merupakan nilai luhur yang harus dijaga.¹⁷ Maka dari itu harmoni budaya dapat dikatakan sebagai representasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Forum Kerukunan Umat Beragama

Dalam upaya untuk mewujudkan kondisi rukun dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya langkah-langkah strategis. Meski bagaimanapun di tengah-tengah kehidupan yang plural ini harus dirawat dengan baik, sehingga meminimalisir dan mencegah konflik yang seringkali dilatarbelakangi oleh perbedaan, egoisitas dan mengklaim apa yang diyakininya adalah sesuatu yang paling benar dengan menafikkan adanya kebenaran di luar keyakinannya (*truth claim*), dengan saling todong menyalahkan satu sama lain. Pada akhirnya berbuntut pada permasalahan baru yaitu ketersinggungan para pemeluk agama karena mengasumsikan seolah agamanya dibuat mainan dan tidak berarti.

¹⁶ Rahmini Hadi, "Pola Kerukunan Umat Beragama Di Banyumas," *Jurnal Ibdā'* 4, no. 1 (2016).

¹⁷ Eka Safitri, Ihsan Sa'dudin, and Didin Nurul Rosidin, "The Values Practice of Scriptures in Building Social-Religious Harmony in Kampung Laut," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, no. 2 (2022): 322–46.

Semestinya setiap individu menghormati agama lain, namun tetap berpegang teguh pada agama yang dianutnya.

Secara garis besar tokoh agama Banyumas bersama jamaah di tempat peribadatnya masing-masing melakukan kegiatan atau program untuk menciptakan iklim harmonis antar umat beragama. Selain itu juga dilakukan melalui ormas keagamaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas, Generasi Muda FKUB Banyumas, Solidaritas Mahasiswa Lintas Iman (SMLI), Forum Persaudaraan Lintas Iman (FORSA) Kesemuanya saling bersinergi demi Banyumas yang aman dan damai.

Berdirinya FKUB Banyumas terbentuk jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Adanya forum lintas agama di Banyumas dilatarbelakangi oleh konflik di sebagian daerah Jawa Timur. Hal tersebut memberikan inspirasi bagi sebagian tokoh Banyumas untuk bertemu dan membentuk sebuah forum. Tokoh agama, pengusaha, dan pemerintahan bertemu seperti Gus Nur, pengasuh Pesantren al-Hidayah, Romo Harjo, Keuskupan Purwokerto, Buntoro, Kapolres, Dandim, dan lain. Pada tahun 1997 dan 1998 bangsa Indonesia mengalami krisis multi dimensi yang berlanjut dengan terjadinya kekerasan politik dan sosial yang berbau SARA mendorong para tokoh mengadakan dialog yang akhirnya melahirkan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) sebagai wadah bersama bagi seluruh umat beragama di wilayah Kabupaten banyumas.

FKAUB merupakan forum swadaya masyarakat yang bersifat sukarela, independen dan mandiri untuk saling membangun kerjasama. FKAUB mengagendakan komunikasi intensif dengan berbagai umat beragama. Pertemuan rutin dilakukan dengan sederhana dan hangat dengan suguhan khas yaitu "tela goreng". Silaturahmi dan dialog informal antar tokoh agama ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari tokoh-tokoh yang lain. Dialog yang diselenggarakan dengan saling berkunjung dari rumah tokoh yang satu ke rumah tokoh berikutnya dengan biaya mandiri. Kemandirian ini ditopang oleh partisipasi berbagai kalangan pengusaha dan tokoh-tokoh umat beragama.

Sekitar sepuluh tahun FPAUB berdiri, pada tanggal 21 Maret 2006, pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dengan pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri tersebut, nama FPAUB dirubah menjadi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Dalam peraturan ini disebutkan secara rinci tugas pokok Kepala Daerah/ Wakilnya, tugas FKUB, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama. (*dokumentasi profil FKUB Banyumas*). Kalimat “*Beda Neng Rukun*” telah menjadi spirit tersendiri bagi FKUB Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai forum yang menjaga gawang kerukunan di Kabupaten Banyumas.

Meski berbeda dan beragam tetapi tetap menuju kerukunan dan kasih sayang untuk menjamin hidup ini agar tetap sejahtera dan damai santosa. Dalam mewujudkan spirit *beda neng rukun* tersebut, FKUB Banyumas mempunyai beberapa langkah strategis baik dalam penyemaian kerukunan dalam keberagamaan, antisipasi ataupun penyelesaian konflik, diantaranya adalah: *pertama* Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Dialog ditujukan untuk lebih memahami individu, kelompok, atau institusi dengan berbagai tradisi dan budaya yang melingkupinya. Menurut Ketua FKUB Banyumas Dr. KH Moh. Roqib., M.Ag makna yang diemban melalui pemakaian simbol-simbol bahasa dan lainnya sangat memungkinkan terjadi perbedaan yang amat ragam. Untuk memahaminya diperlukan dialog untuk klarifikasi (*tabayun*).

FKUB Banyumas cukup responsif terhadap problem atau isu faktual kaitanya dengan hubungan antar umat beragama di Banyumas. Jika gejala konflik terasakan, FKUB segera mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Proaktif pemerintah sangat berperan untuk menjaga keharmonisan hidup antar agama. Dalam hal ini FKUB menjadi mediator yang menjelaskan duduk persoalan dari aspek dan pendekatan keagamaan. Sementara posisi pemerintah yang menjadi “Bapak” semua warga harus “menunjukkan” sisi keadilan dan kemanusiaannya. Tanpa keadilan dan kemanusiaan konflik akan mudah dipicu dan membesar. Sebagai contoh, kaitanya dengan maraknya siswa SMA yang terpapar

radikalisme, FKUB melalui audiensi bersama Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas segera menyusun langkah strategis melalui program FKUB *goes to school* (Observasi dan wawancara, 10 Juli 2019). Sebagaimana dikatakan oleh Ketua FKUB Banyumas,

“Sebagai langkah antisipasi, FKUB akan ke melakukan sekolah-sekolah dengan memberikan pemahaman dengan tidak membedakan antara yang terindikasi ataupun tidak, semuanya kita pahami dari sebagian kader yang butuh sapaan dari masyarakat.”

Hal tersebut merupakan bagian dari diseminasi FKUB agar pesan kerukunan tersampaikan kepada siswa-siswi di SMA/ sederajat, sebagaimana yang kita tahun bahwa pelajaran yang memuat toleransi sangat minim disampaikan oleh guru di samping jam pelajaran sangat minim, sehingga siswa pun menerima sampai pada pengetahuan saja tidak sampai pada praktiknya di lapangan disertai kesadaran kolektif bahwa menjaga baik hubungan antar umat beragama menjadi suatu yang tidak perlu ditawar lagi. Hal tersebut sudah menjadi konsekuensi menjadi manusia yang hidup bermasyarakat dengan berbagai macam perbedaannya. Sebab suatu perbedaan mustahil untuk ditolak keberadaannya. Ia telah mewujud dan niscaya sebagai *sunnatullah*.

Dalam rangka menyasar penyemaian kerukunan ke tingkat Kecamatan, M. Wahyu Fauzi Aziz selaku sekretaris FKUB Banyumas mengungkapkan, FKUB melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) membentuk FKUB tingkat kecamatan. Adapun pada tahun ini ada enam FKUB kecamatan yang dibentuk, yaitu Kecamatan Sumpiuh, Sokaraja, Ajibarang, Banjarpanepen, Cilongok, Wangon dan Jatilawang. Adapun di tahun sebelumnya telah dibentuk di Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto, Selatan, Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat. Srie Yono selaku Asisten Pemerintahan Kabupetan Banyumas menyatakan FKUB tingkat kecamatan dibentuk, sebagai wadah kerukunan umat beragama serta mitra pemerintah untuk mencipta kerukunan beragama di lingkungan wilayah masing-masing kecamatan.

Lebih dari itu FKUB Banyumas pada 2 September 2019 juga mencanangkan Desa Sadar Kerukunan tingkat Kabupaten Banyumas. Adapun desa yang memiliki kualifikasi untuk dijadikan Desa Sadar Kerukunan adalah Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh. Menurut Plh. Kepala Kan. Kemenag Banyumas, Ibnu

Asaddudin menyatakan bahwa Banyumas adalah salah satu enam Kabupaten di Jawa Tengah yang terpilih untuk mencanangkan Desa Sadar Kerukunan. Program tersebut merupakan program unggulan dari Kementerian Agama RI, yang bertujuan untuk melestarikan dan sebagai upaya dalam pengembangan kerukunan umat beragama sampai tingkat desa/kelurahan agar pesan kerukunan tersebut terjaga dengan baik.

Ketua FKUB Banyumas, KH. Mohammad Roqib menjelaskan penetapan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah pengurus FKUB yang kemudian dikonsultasikan kepada Bupati Banyumas. Beliau menjelaskan ditetapkannya Banjarpenepen sebagai Desa Sadar Kerukunan karena dihuni oleh berbagai macam agama baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan Penghayat Kepercayaan dan memiliki keunikannya tersendiri. Harapannya desa tersebut menjadi *role model* desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menjadi contoh untuk Banyumas bahkan tingkat nasional).

Selain FKUB melakukan langkah strategis dalam menangani berbagai konflik dan upaya mewujudkan kerukunan FKUB Banyumas juga melakukan kaderisasi untuk generasi kepemudaan FKUB dan pada tingkat mahasiswa, yakni Generasi Muda (GM) FKUB Banyumas dan Solidaritas Mahasiswa Lintas Iman (SMLI). Dimas Indianto S selaku Ketua Generasi Muda FKUB, menuturkan bahwa Generasi Muda FKUB ini merupakan kepanjangan tangan dari FKUB Banyumas dalam rangka penanganan konflik dan dalam rangka program deradikalisasi agama di kalangan pemuda, dimana saat ini banyak kalangan muda yang mudah terpapar radikalisme beragama.

Forum Persaudaraan Lintas Iman

FORSA adalah kepanjangan dari “Forum Persaudaraan Lintas Iman”, yang dibentuk pada Mei 2017. FORSA dibentuk sebagai *follow up* dari kegiatan *interacting live* agamawan muda se-Banyumas di Hotel Dominic Purwokerto Mei yang diadakan oleh *Dialogue Center* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FORSA dalam hal ini merupakan forum independen di luar kepengurusan FKUB Banyumas, namun saling bersinergi. FORSA kemudian dikukuhkan oleh Bupati Banyumas Ir.H. Husein bersamaan dengan acara silaturahmi dengan Ibu Shinta Nuriyah Wahid di Purwokerto pada Juni 2017.

FORSA dalam menjalankan kegiatan lebih fleksibel. Dalam perencanaan biaya dilakukan secara bersama atau swadaya, mengingat FORSA adalah forum yang dilatarbelakangi oleh kegiatan lintas agama yang kemudian menimbulkan kesadaran kolektif akan pentingnya menyemai spirit perdamaian di tengah perbedaan. FORSA secara intensif dimonitoring oleh tim *Dialogue Center* Yogyakarta, agar forum yang terbentuk tetap eksis dan terus bergeliat menebarkan virus-virus perdamaian sesuai dengan salah satu misi *Dialogue Center*.

Zaenudin selaku Ketua *Dialogue Center* menuturkan bahwa FORSA menjadi kekuatan teman-teman untuk men-*support* pemerintah dan masyarakat supaya di Banyumas ini ada semacam magnet kerukunan yang kuat. Musmuallim selaku Ketua FORSA mengatakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan FORSA mengikuti momen-momen keagamaan, maupun kegiatan insidental yang berangkat dari isu-isu yang muncul berkaitan keagamaan dan kebhinekaan baik lokal maupun nasional. Adapun peran FORSA Banyumas dalam rangka “meneguhkan kebhinekaan menjaga NKRI” sebagaimana mottonya, adalah sebagai berikut:

1. *Melakukan diseminasi kerukunan baik kegiatan secara langsung di lapangan ataupun melalui media.* Kegiatan secara langsung di lapangan, salah satunya mendorong Pemilu damai. Wujud konkritnya FORSA mendorong anggotanya untuk menjadi relawan demokrasi jelang Pemilu 2019. Ketua FORSA Banyumas Musmuallim mengatakan iklim Pemilu yang mulai menghangat patut menjadi perhatian. Apalagi di tengah pesatnya teknologi digital. Penyebaran berita palsu dan provokasi berbau SARA harus dilawan dengan berbagi kampanye positif. Sedangkan diseminasi melalui media yakni secara intensif dengan membuat meme atau flyer yang berisi pesan kerukunan yang kemudian disebarakan melalui media sosial.
2. *Sekolah Minggon.* Sekolah Minggon merupakan forum belajar bersama anak muda tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sekolah Minggon telah terlaksana dua kali, yang pertama adalah pelajar di Desa Klinting Kecamatan Somagede, tepatnya di kompleks Pura Pedalaman Giri Kendeng pada 14 April 2019 dan di Vihara Ratna Vidya Loka Banjarpanepen Sumpiuh pada 21 Juli 2019. Di sekolah tersebut mereka berkumpul bersama saling berbagi pengalaman tentang kerukunan dan

perdamaian. Adapun yang menjadi mentor adalah delegasi dari anggota FORSA, selain permainan anak-anak diberikan pembelajaran tentang kebhinekaan, dan mengajak generasi muda dengan latar belakang berbeda dapat menebar perdamaian terutama di media sosial. Mereka diajak untuk memanfaatkan media sosial sebagai bahan promosi pesan perdamaian, kerukunan hingga potensi ekonomi dari masing-masing desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Js. Budi Rohadi tokoh elit Konghucu yang juga tergabung di FORSA, siswa dibekali bagaimana mengidentifikasi berita hoaks atau informasi yang bisa mengajak pada intoleransi hingga provokasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Sehingga para remaja yang berbeda agama ini bisa menjadi agen untuk promosi toleransi dan moderasi dalam hidup beragama yang sudah mereka jalani selama ini. Slamet pegiat FORSA dari unsur Hindu menyatakan bahwa materi Sekolah Minggu Keragaman sangat sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana. Tri Hita Karana adalah ajaran tentang tiga penyebab kebahagiaan. Adapun tiga unsur tersebut tiada lain adalah hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Tanpa jalinan harmoni ketiga hubungan tersebut mustahil kebahagiaan dan keharmonisan hidup manusia dapat tercapai. Maka dari itu selain dipupuk rasa persaudaraan lintas iman dalam kegiatan Sekolah Minggu juga dilaksanakan kegiatan penanaman pohon di sekitar lokasi kelas. Hal tersebut diharapkan ajaran Tri Hita Karana bisa terwujud.

FORSA On The Road merupakan kegiatan rutin FORSA selama tiga tahun terakhir semenjak dibentuk khusus pada bulan Ramadhan. FORSA momentum Ramadhan untuk menyampaikan pesan kerukunan dan menjalin persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan FORSA On The Road yaitu, 1) bagi takjil kepada pengendara lalu lintas jelang waktu berbuka puasa. Para pegiat FORSA yang berlatar belakang agama berbeda bersama-sama turun ke jalan membagikan takjil kepada pengendara yang melintas, 2) buka bersama di Klenteng Hok Tek Bio Purwokerto, baik yang Islam dan yang beragama lain bersama-sama menyantap menu buka yang disediakan khusus oleh pengurus Klenteng, 3) program 'Ayo Tilik Posko Mudik Lebaran 2019'. Kegiatan tersebut dilaksanakan di waktu yang berbeda yaitu jelang Hari Raya Idul Fitri.

Melalui program tersebut pesan kerukunan disampaikan untuk menjalin persaudaraan dan sebagai ajang untuk memberikan kepedulian kepada relawan posko mudik yang tersebar di Banyumas. Dari rangkaian program FORSA *on the road* ini diharapkan dapat membagi pesan damai dan bersahabat dalam suasana menjalankan tugas kemanusiaan di posko pemantauan arus lalu lintas. Program ini sudah kali ketiga dilakukan yang diiniasi anggota secara swadaya. Membagi bingkisan, air mineral dan masker bagi petugas posko. Musmuallim menyampaikan, program semacam ini jarang dilakukan oleh pihak lain. Pada saat banyak orang sibuk dengan urusan mudik dan lebaran, namun anggotanya berkomitmen turun ke jalan menebar kebaikan yang tidak banyak orang lain lakukan. Momentum mudik lebaran sebagai sarana menjalin persaudaraan. Menjaga toleransi dalam keragaman untuk harmonisasi kehidupan yang lebih baik.

Simpulan

Keutuhan negara adalah sebuah tanggungjawab kolektif, oleh karena itu sebagai Warga Negara Indonesia harus menjaga keutuhan negara. Negara Indonesia memiliki keberagaman salah satunya agama yang memiliki berbagai macam agama. Sehingga siapapun yang merasa memiliki rasa nasionalisme harus menunjukkan kepeduliannya, termasuk di dalamnya menciptakan kehidupan yang harmonis. Salah satunya keberagaman agama yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri dari Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini harus diciptakan harmoni antara agama agar senantiasa hidup damai dan saling toleransi. Upaya harmoni keberagaman di Kabupaten Banyumas telah dilakukan oleh berbagai pihak yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa harmoni keberagamaan di kabupaten banyumas berhasil disebabkan karena tidak ada saling curiga tokoh lintas agamanya dan mempunyai pemahaman yang sama perihal sesanti beda neng rukun yang menjadi landasan kehidupan beragama dan bermasyarakat selain itu kebersamaan masyarakat dilandasi ketulusan hati tokoh tokohnya sehingga terjadi harmoni keberagamaan di Kabupaten Banyumas.

Daftar Pustaka

- Abdullah dkk, Irwan. *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pusat Belajar, 2008.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 35. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69>.
- Firdaus, Muhammad. "Eksistensi FKUB Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia." *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014): 63–84.
- Hadi, Rahmini. "Pola Kerukunan Umat Beragama Di Banyumas." *Jurnal Ibda'* 4, no. 1 (2016).
- Haliim, Wimmy. "Harmony and Tolerance as a Tengger Identity: Reflections for Indonesian Identity and Unity Degradation." *International Journal of Social Sciences* 1, no. 1 SE- (April 2018): 1–8. <https://doi.org/10.31295/ijss.v1n1.1>.
- Hjerm, Mikael, Maureen A. Eger, Andrea Bohman, and Filip Fors Connolly. "A New Approach to the Study of Tolerance: Conceptualizing and Measuring Acceptance, Respect, and Appreciation of Difference." *Social Indicators Research* 147, no. 3 (2020): 897–919. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02176-y>.
- Maher, Carmel, Mark Hadfield, Maggie Hutchings, and Adam de Eyto. "Ensuring Rigor in Qualitative Data Analysis: A Design Research Approach to Coding Combining NVivo With Traditional Material Methods." *International Journal of Qualitative Methods* 17, no. 1 (July 2018): 1609406918786362. <https://doi.org/10.1177/1609406918786362>.
- Raudatul, Ahmad Rosidi; Anik Farida; Asnawati; Edi Junaedi; M. Taufik Hidayatullah; R. Adang Nofandi;, and Ulum; Reslawati; Wakhid Sugiyarto; Zaenal Abidin Eko Putro. *Potret Umat Agama Khonghucu Di Indonesia*, 2019.
- Sa'dudin, Ihsan, Muhamad Riza Chamadi, Fathoni Achmad, and Ahmad Zayyadi. "Interaksi Sosial Komunitas Islam Aboge Dengan Masyarakat Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas." *Jurnal Tarbiyatuna* 10, no. 1 (2019): 103–13. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i1.2308>.
- Safitri, Eka. "Instilling the Value of Religious Pluralism as the Effort to Overcome the Religious Conflict." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 15, no.

- 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.3897>.
- Safitri, Eka, Ihsan Sa'dudin, and Didin Nurul Rosidin. "The Values Practice of Scriptures in Building Social-Religious Harmony in Kampung Laut." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, no. 2 (2022): 322–46.
- Sahal, Muhammad, Akhmad Arif Musadad, and Muhammad Akhyar. "Tolerance in Multicultural Education: A Theoretical Concept." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 4 (2018): 115. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.212>.
- Salkind, Neil. "Encyclopedia of Research Design." Thousand Oaks, California, 2010. <https://doi.org/10.4135/9781412961288 NV - 0>.
- Shofan, Moh. *Pendidikan Berparadigma Profetik*. Yogyakarta: IRRCiSoD, 2004.
- Suhaidi, Mohamad. "Harmoni Masyarakat Satu Desa Tiga Agama Di Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Madura." *Harmoni* 13, no. 2 (2014): 8–19.
- Watra, I Wayan. *Agama-Agama Dalam Pancasila Di Indonesia*, 2020.
- Yunaldi, Wendra. "The Dynamic Interpretation of Pancasila in Indonesian State Administration History: Finding Its Authentic Interpretation." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (2020): 39. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15166>.